

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Transparansi merupakan agenda wajib yang harus dilakukan oleh suatu organisasi, yang memuat informasi secara jelas yang sekiranya informasi tersebut diperlukan oleh publik atau pihak-pihak yang terkait. Publik mempunyai hak untuk mengetahui atas segala bentuk pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu bentuk dari pertanggungjawaban pemerintah adalah dengan terbentuknya otonomi daerah.

Otonomi daerah di Indonesia telah dilaksanakan sejak tahun 2001. Peraturan undang-undang yang mengatur tentang otonomi daerah tercantum dalam UU No. 32 tahun 2004, yang menjelaskan bahwa otonomi daerah adalah hak, kewajiban, dan wewenang untuk mengatur sendiri dalam pemerintahannya. Tujuan utama terbentuknya otonomi daerah yaitu guna tercapainya *good government governance* atau tata kelola pemerintahan yang baik. Salah satu upaya untuk mewujudkan *good government governance* yaitu dengan meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan (Putra, 2016).

Transparansi pengelolaan keuangan daerah menjadi suatu hal yang sangat penting saat ini. Masyarakat berharap adanya otonomi daerah mampu menciptakan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya daerah, meningkatkan kualitas pelayanan umum dan kesejahteraan rakyat, serta

membudayakan dan menciptakan ruang bagi rakyat untuk ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan (Putra, 2016). Mewujudkan harapan masyarakat tentunya harus ada suatu mekanisme-mekanisme yang terkait agar harapan tersebut mampu tercapai secara optimal.

Terdapat tiga mekanisme yang dapat dilaksanakan pemerintah daerah agar lebih responsif, transparan dan akuntabel sehingga kedepannya dapat mewujudkan pemerintahan yang baik. Mekanisme-mekanisme yang dimaksud yaitu mendengarkan aspirasi dari masyarakat dan membangun kerjasama pemberdayaan masyarakat, memperbaiki *internal rules* dan mekanisme pengendalian, serta membangun iklim kompetisi dalam memberikan layanan terhadap masyarakat dan juga marketisasi layanan (Putra, 2016). Masing-masing mekanisme tersebut saling berkaitan dan saling menunjang untuk memperbaiki efektivitas pengelolaan keuangan daerah.

Menurut Putra (2016) menjelaskan bahwa mekanisme tata kelola pelaporan keuangan memiliki dua tujuan, yaitu organisasi yang transparan dan keterlibatan pemangku kepentingan (*stakeholders*). Masyarakat memiliki hak dasar untuk tahu (*basic right to know*) dan memperoleh informasi mengenai aktivitas yang dilakukan pemerintah, alasan suatu kebijakan atau program tersebut dilakukan, serta cara organisasi menjalankan operasionalnya. Pelaksanaan pelaporan keuangan tersebut tentunya diatur oleh Perda yang berlaku.

Pelaporan keuangan yang transparan diatur dalam Perda, dan sudah tercatat 12 Kabupaten/Kota di Indonesia yang memiliki Peraturan

Daerah (Perda) yang mengatur tentang transparansi pelaporan keuangan daerah dan partisipasi masyarakat. Kabupaten/Kota tersebut adalah Kabupaten Lebak, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Solok, Kabupaten Magelang, Kota Surabaya, Kota Semarang, Kota Yogyakarta, dan Kota Surakarta. Kabupaten Magetan yang menjadi objek penelitian ini belum termasuk dalam daftar daerah yang telah memiliki Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur tentang transparansi pelaporan keuangan dan partisipasi masyarakat, namun berdasarkan pada opini BPK yang memberikan predikat Wajar Tanpa Pengecualian(WTP) pada LKPD tahun 2014-2017. Predikat opini tersebut dapat dijadikan dasar pengakuan bahwa LKPD Kabupaten Magetan pada tahun tersebut diasumsikan sudah transparan, atau dengan kata lain telah menerapkan transparansi.

Beberapa daerah telah menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) yang berhubungan dengan transparansi dan partisipasi masyarakat sebelum diterbitkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, tetapi disisi lain masih banyak peraturan daerah yang tidak mencantumkan sanksi didalamnya sehingga pelaksanaan dan penegakan transparansi sukar untuk diterapkan (Ridha dan Basuki, 2012). Transparansi yang sukar diterapkan akan memunculkan dampak negatif yaitu adanya ketidakadilan bagi masyarakat, penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang, menimbulkan kekacauan dalam alokasi sumber daya, dan memperbanyak praktik korupsi (Asroel, 2016).

Menurut Transparency International Indonesia pada tahun 2017 ini, tingkat korupsi masih pada level atas dengan CPI (*Corruption Perceptions Index*) sebesar 3,0 (dengan kisaran 0-10). Korupsi merupakan salah satu penyebab krisis ekonomi di Indonesia, hal tersebut merupakan salah satu akibat dari penyelenggaraan pemerintah yang tidak dikelola dan diatur dengan baik (Pramitha dan Khikmah, 2013). Kasus korupsi di Indonesia telah lama marak terjadi, tidak hanya pada ibukota ataupun kota-kota besar namun juga terjadi pada kota-kota atau daerah kecil .

Sebagai contoh kasus korupsi, dapat dilihat pada tahun anggaran 2014. Kepala Bappeda Kabupaten Magetan telah terbukti korupsi, yaitu dengan melakukan kecurangan dana pengadaan sepatu PNS senilai Rp 1,2 miliar sehingga menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 100 juta lebih. Kasus tersebut dianggap hampir mirip dengan kasus korupsi E-KTP, karena kasus tersebut terjadi secara sistematis (www.kompas.com, diakses pada Mei 2017).

Pemerintah Kabupaten Magetan periode 2014-2017 telah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (www.magetan.go.id, diakses September 2017). LKPD Kabupaten Magetan pada periode tersebut telah menyajikan laporan keuangan secara wajar material yang artinya PEMDA Kabupaten Magetan menyajikan laporan keuangan dengan baik, namun disisi lain masih ditemukan beberapa pihak melakukan kecurangan. Artinya kemungkinan terindikasi faktor-faktor yang dianggap mampu mempengaruhi dalam melakukan transparansi pelaporan keuangan. Beberapa faktor tersebut

adalah tekanan eksternal, komitmen manajemen, akuntabilitas, dan ketidakpastian lingkungan.

Salah satu faktor yang dianggap memiliki pengaruh pada penerapan transparansi pelaporan keuangan adalah tekanan eksternal. Tekanan eksternal merupakan tekanan yang berasal dari luar organisasi seperti tuntutan masyarakat, peraturan undang-undang, dan lain-lainnya (Adha, 2014). Adanya tekanan eksternal yang tinggi yg terjadi suatu organisasi akan memicu penerapan transparansi. Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa tekanan eksternal adalah serangkaian aktivitas yang berusaha untuk mewujudkan suatu transparansi, dan transparansi tersebut akan tercapai lebih optimal ketika terdapat komitmen manajemen dari seluruh anggota organisasi.

Komitmen manajemen yaitu kemampuan dan kemauan untuk menyelaraskan perilaku pribadi dengan kebutuhan, dan prioritas, serta tujuan suatu organisasi (Yesnita, 2016). Penerapan transparansi dikatakan baik ketika suatu organisasi memiliki komitmen yang tinggi, dimana komitmen yang tinggi adalah ketika individu mendahulukan kepentingan suatu organisasi yang dianggap sangat penting untuk mencapai tujuan, dan juga antara individu satu dengan individu lainnya mampu bekerja sama untuk memperkuat organisasi tersebut. Suatu organisasi yang baik dalam rangka mewujudkan transparansi pelaporan keuangan tidak hanya berpacu pada komitmen manajemen saja namun juga harus menerapkan akuntabilitas.

Menurut Mardiasmo (2002) memaparkan bahwa akuntabilitas adalah suatu kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, dan melaporkan, serta mengungkapkan seluruh aktivitas yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah yang mempunyai hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Akuntabilitas dianggap sebagai faktor dalam penerapan transparansi pelaporan keuangan, dimana semakin tinggi tingkat akuntabilitas pada suatu organisasi maka penerapan transparansi akan semakin baik dan meningkat. Akuntabilitas salah satu strategi untuk mewujudkan pelaporan keuangan yang transparan, namun dalam mewujudkannya diperlukan juga kemampuan yang tinggi untuk memprediksi keadaan laporan keuangan di masa depan dengan beberapa hal yang harus dipertimbangkan yaitu salah satunya adalah faktor lingkungan atau dapat disebut dengan ketidakpastian lingkungan.

Ketidakpastian lingkungan didefinisikan sebagai faktor-faktor lingkungan yang dialami oleh suatu organisasi dan mampu berpotensi mengganggu kinerja bila organisasi tersebut tidak bisa beradaptasi secara baik dengan segala laju perubahan dan dinamika (Asroel, 2015). Ketidakpastian lingkungan yang tinggi akan membuat para pegawai menutupi proses pelaporan keuangan, padahal laporan keuangan merupakan informasi paling utama dalam kegiatan sektor publik yang harus disajikan secara jujur dan akurat. Penerapan transparansi mampu dicapai dengan maksimal ketika ketidakpastian lingkungan direspon dengan melakukan studi banding atau

dengan menggunakan jasa konsultan dari organisasi yang telah dianggap berhasil.

Objek pada penelitian ini adalah PEMDA Kabupaten Magetan. LKPD Kabupaten Magetan tahun 2014 hingga 2017 telah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK. Tetapi meskipun sudah diraihinya WTP masih ada indikasi dari beberapa pihak internal yang melakukan korupsi. Kondisi tersebut yang menjadi dasar fenomena pada penelitian ini. Penjelasan dan fenomena tersebut memotivasi peneliti untuk meneliti faktor penerapan transparansi pelaporan keuangan. Penelitian seperti ini sebagian sudah dilakukan terlebih dahulu pada beberapa daerah dengan tempat dan tahun penelitian yang berbeda.

Beberapa penelitian sebelumnya yang terkait dengan transparansi pelaporan keuangan daerah menghasilkan keanekaragaman hasil penelitian. Penelitian Ridha dan Basuki (2012) menggunakan variabel independen tekanan eksternal, ketidakpastian lingkungan, dan komitmen manajemen sedangkan variabel dependennya adalah transparansi pelaporan keuangan. Hasil penelitiannya menyebutkan bahwa ketidakpastian lingkungan tidak berpengaruh terhadap transparansi pelaporan keuangan daerah. Penelitian Fardian (2014) dengan variabel independen faktor politik, ketidakpastian lingkungan, kompetensi SDM dan variabel dependennya yaitu transparansi pelaporan keuangan daerah. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa faktor politik dan kompetensi SDM berpengaruh terhadap transparansi pelaporan keuangan. Masruroh (2015) menggunakan variabel independen tekanan

eksternal, ketidakpastian lingkungan, komitmen manajemen, kapasitas SDM dengan variabel dependen transparansi pelaporan keuangan. Hasil penelitian tersebut membuktikan bahwa tekanan eksternal dan kapasitas SDM berpengaruh terhadap transparansi pelaporan keuangan daerah.

Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu, lokasi penelitian, periode penelitian, dan variabel penelitian. Lokasi yang digunakan oleh peneliti yaitu Kabupaten Magetan dengan periode penelitian tahun 2017. Penelitian ini menambahkan variabel Akuntabilitas, dengan maksud untuk lebih jauh menganalisis faktor penerapan transparansi pelaporan keuangan daerah.

Penelitian tentang transparansi pelaporan keuangan daerah sudah dilakukan pada beberapa daerah yang berbeda, sebagian dari penelitian tersebut dilakukan pada kota-kota besar atau daerah yang sudah memiliki Perda. Penelitian ini memilih Kabupaten Magetan karena merupakan daerah yang lebih sempit dan terindikasi korupsi, oleh karena itu peneliti termotivasi untuk mengkaji lebih lanjut dengan mengambil judul **“Pengaruh Tekanan Eksternal, Komitmen Manajemen, Akuntabilitas, Dan Ketidakpastian Lingkungan Terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada SKPD Kabupaten Magetan).**

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka masalah penelitian yang akan dikaji adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pengaruh tekanan eksternal terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan daerah pada SKPD Kabupaten Magetan ?
2. Bagaimanakah pengaruh komitmen manajemen terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan daerah pada SKPD Kabupaten Magetan ?
3. Bagaimanakah pengaruh akuntabilitas terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan daerah pada SKPD Kabupaten Magetan ?
4. Bagaimanakah pengaruh ketidakpastian lingkungan terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan daerah pada SKPD Kabupaten Magetan ?
5. Bagaimanakah pengaruh tekanan eksternal, komitmen manajemen, akuntabilitas, dan ketidakpastian lingkungan secara bersama-sama terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan daerah pada SKPD Kabupaten Magetan ?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh tekanan eksternal terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan daerah pada SKPD Kabupaten Magetan.

2. Untuk mengetahui pengaruh komitmen manajemen terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan daerah pada SKPD Kabupaten Magetan.
3. Untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan daerah pada SKPD Kabupaten Magetan.
4. Untuk mengetahui pengaruh ketidakpastian lingkungan terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan daerah pada SKPD Kabupaten Magetan.
5. Untuk mengetahui pengaruh tekanan eksternal, komitmen manajemen, akuntabilitas, dan ketidakpastian lingkungan secara bersama-sama terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan daerah pada SKPD Kabupaten Magetan.

1.3.2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian bagi pihak adalah sebagai berikut :

1. Bagi Universitas

Penelitian ini dapat menambah kekayaan literatur yang dapat digunakan sebagai bahan referensi mengenai pengembangan teori yang berkaitan dengan transparansi pelaporan keuangan daerah.

2. Bagi Pemerintah Daerah

Penelitian ini dapat dijadikan masukan bagi pemerintah mengenai transparansi pelaporan keuangan dan penerapannya, serta

pengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah untuk kedepannya, sehingga diharapkan akan tercipta tata kelola pemerintahan yang baik.

3. Bagi Peneliti

Penelitian ini sangat berguna bagi peneliti untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai transparansi pelaporan keuangan, sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai pengaruh tekanan eksternal, komitmen manajemen, akuntabilitas, dan ketidakpastian lingkungan tersebut.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan referensi mengenai topik-topik yang berkaitan dengan penelitian ini, dan juga dapat dijadikan replikasi untuk melaksanakan penelitian dengan tema yang sama dimasa mendatang dengan menggunakan variabel- variabel lainnya yang mungkin dapat mempengaruhi transparansi pelaporan keuangan.

